

**PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR  
14 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF  
*SIYÂSAH DUSTÛRIYYÂH*  
(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
ROHAJI  
NPM : 1321020058**

**Program Study : Hukum Tata Negara (*Siyâsah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

**PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR  
14 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF  
*SIYÂSAH DUSTÛRIYYÂH*  
(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## ABSTRAK

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah sejatinya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *Junto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, perubahan selanjutnya diatur dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pemilihan langsung yang dilakukan secara demokrasi dan serentak, memilih pemimpin di daerah yang diinginkan oleh masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pada pemilihan Bupati Kabupaten Tanggamus. Bagaimana tinjauan *siyâsah dustûriyyâh* terhadap proses penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah nomor 14 Tahun 2017.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi dalam pemilihan Bupati Kabupaten Tanggamus, dan bagaimana proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus. Mengetahui bagaimana pandangan *siyâsah dustûriyyâh* tentang penyelesaian pelanggaran tersebut.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder melalui buku-buku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan pada saat penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa pelanggaran baik temuan maupun laporan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus antara lain adalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan meliputi; penurunan alat peraga kampanye, pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai tempat, alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai ukuran dan pidana pemilihan meliputi; kerusakan alat peraga kampanye, politik uang, netralitas kepala pekon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus dengan putusan memenuhi syarat dan tidak memenuhi Syarat. Menurut *siyâsah dustûriyyâh* sepanjang pelaksanaan peraturan tersebut ditunjukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tidak ada keberatan dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip dalam hukum Islam. menegakkan keadilan adalah merupakan hal yang sangat penting baik dikaitkan dengan pemilihan pemimpin maupun dalam proses menyelesaikan perkara hukum lainnya. Dikarenakan keadilan merupakan sistem segala sesuatu yang ada di dunia.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi Arab-Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	(a) Tidak dilambangkan	ض	<u>d</u>
ب	b	ط	<u>t</u>
ت	t	ظ	<u>z</u>
ث	ś	ع	‘
ج	j	غ	g
ح	<u>h</u>	ف	F
خ	kh	ق	Q
د	d	ك	K
ذ	z	ل	L
ر	r	م	M
ز	z	ن	N
س	s	و	W
ش	sy	ه	H
ص	<u>s</u>	ء	’
		ي	y

### Tanda Vokal Tunggal

أ	a	تَرَكَ
إ	i	كَرِبَ
أُ	u	شُدْتُ

### Tanda Vokal Panjang (*Madd*)

آ	â	نِسَا
ئِ	î	فِي
وُ	û	وَقُولُوا





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG  
PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF  
SIYÂSAH DUSTÛRIYYÂH (Studi di Badan Pengawas  
Pemilu Kabupaten Tanggamus)**

**Nama Mahasiswa : Rohaji**

**NPM : 1321020058**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyâsah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

**NIP. 197403072000121002**

**Pembimbing II**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**NIP. 197509302003121002**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyâsah Syar'iyah)**

**Dr. Nurnazli, SH, S.Ag. M.H.**

**Nip : 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarami, Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN  
LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTURIYYÂH** (Studi di Badan Pengawas Pemilu  
Kabupaten Tanggamus), disusun oleh **Rohaji**, NPM 1321020058, Program  
Study: **Hukum Tata Negara (Siyâsah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang  
Munaqasasah Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : **Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.** (.....)

**Sekretaris** : **Arif Fikri., S.H.I., M.A.** (.....)

**Penguji Utama** : **Agustina Nurhayati., S.Ag. M.H.** (.....)

**Penguji Pendamping I** : **Dr. H. Yusuf Baihaqi., Lc., M.A.** (.....)

**Penguji Pendamping II** : **Eko Hidayat., S.Sos., M.H.** (.....)

**Mengetahui**

**Dehan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An Nisâ’ :5:58)

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan sebagai ungkapan terimakasih. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu ku tercinta (Sri Suryati) dan Bpk ku tercinta (Slamet Riadi) terimakasih atas setiap doa di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah SWT, lantunan do'a dan restu selalu saya harapkan, semoga anakmu ini menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakak ku dan adik ku tersayang (Royfudin S.Pd dan Rohanah S,Pd.I) serta adikku (Rohimah) yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan ini, semoga kita semua menjadi kebanggaan keluarga suatu hari nanti.
3. Makwo, Pakde, Bu'de, paman, bibi. Yang telah memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah Angkatan 2013.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung di mana tempat penulis menuntut ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada tanggal 13 juni 1993. Dengan nama lengkap **“ROHAJI”** anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan **Slamet Riadi** dengan **Sri Suryati**.

Penulis menempuh pendidikan pertama kali Taman Kanak-kanak (TK) Aisiyah Gisting pada tahun 1997 dan lulus tahun 1999, dan kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwodadi tahun 2001, kemudian pindah sekolah di, SDN 3 Purwodadi Gisting dan lulus tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama (SMP) Muhammadiyah I Gisting dan lulus tahun 2009, dan dilanjutkan ke sekolah menengah atas (SMA) Muhammadiyah I Gisting dan lulus tahun 2012.

Kemudian penulis melanjutkan Study nya pada tahun (2013) dan mendaftar pada salah satu perguruan tinggi yang ada di Lampung yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan yang sekarang beralih nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dan di terima di Fakultas Syari'ah Prodi *Siyâsah Syar'iyah*.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di organisasi ekstra kampus, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah.

## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain kalimat tasyakkur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya penulis diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)”**.

Shalawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah semaksimal mungkin untuk mewujudkan suatu skripsi yang baik dan sempurna, namun dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, sehingga skripsi ini tersusun dalam bentuk yang sederhana. Penulis berharap skripsi ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk meningkatkan serta memperbaiki langkah selanjutnya, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Untuk



itu penulis menyampaikan rasa gembira dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Khairuddin, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., Selaku Ketua Prodi Siyasah Syar'iyah dan Frenki. M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Syar'iyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., Selaku Pembimbing I, dan Bapak Eko Hidayat S.Sos., M.H., Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan saran dan pengarahan serta membimbing penulis dengan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Tim Penguji Munaqasyah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syari'ah Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanggamus, dan para staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus, yang telah mau memberikan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Terimakasih banyak untuk Zara Rizqiah HMN., S.H. yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan Sahabat-sahabt seperjuangan di PMII Rayon Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

**Bandar Lampung, 29 November 2019**

**Penulis,**

**ROHAJI**  
**NPM. 1321020058**





## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul .....	1
B. Alasan memilih judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan masalah .....	9
F. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Signifikasi Penelitian .....	11
H. Metode penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12
3. Populasi dan Sampel .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	15
5. Metode Pengolaan Data .....	16
6. Analisis Data .....	16

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemilihan Kepala Daerah Perspektif <i>Siyâsah Dustûriyyâh</i> .....	18
B. Pemilihan Kepala Daerah dan Urgensinya .....	32
C. Tinjauan Pustaka .....	40

### BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga Bawaslu Kabupaten Tanggamus	
1. Sejarah Pembentukan Bawaslu Kabupaten Tanggamus .....	49
2. Susunan Organisasi .....	52
3. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Tanggamus .....	54

4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Tanggamus .....	55
B. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 .....	57
1. Bentuk-bentuk Pelanggaran yang Terjadi Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Tanggamus .....	61
2. Proses Penanganan Pelanggaran .....	64

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pelaksanaan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus.....	75
B. Pandangan <i>Siyâsah Dustûriyyâh</i> dalam Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Tanggamus .....	81

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **“Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyâsah Dustûriyyâh*, (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)”**. Dan menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang perlu di beri penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman ( petunjuk, kaidah, atau ketentuan).<sup>1</sup>
2. Badan pengawas pemilu adalah biasa disingkat bawaslu suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>
3. Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat sebagai pemilih.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/peraturan.html> (tanggal 10 oktober 2018) 09:45

<sup>2</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_umum](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_umum) (tanggal 10 Oktober 2018) 10:10

<sup>3</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada serentak* ( Bandung : expose, 2017 ), hlm. 80

4. *Siyâsah Dustûriyyâh* adalah bagian *fiqh siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>4</sup>

Pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. Dan perubahan lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

Penjelasan judul secara menyeluruh pemaparan diatas yaitu adalah lebih terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dalam pilkada serentak 2018. Dengan judul skripsi di atas, Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyâsah Dustûriyyâh* (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis yang mendorong memilih judul skripsi ini adalah :

### **1. Alasan Objektif**

- a. Pemilihan kepala daerah merupakan suatu momentum yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi, sekaligus tahapan yang menentukan masadepan suatu kelompok masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota.

---

<sup>4</sup> Wahbah-Al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus : Darul Fikr, 2001), hlm. 18

- b. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) senantiasa ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para kontestan yang ini memerlukan pengawasan dan penanganan yang serius.

## 2. Alasan Subjektif

Permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas dan dikaji. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu penulis, tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini serta belum pernah di bahas oleh mahasiswa dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Radenintan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lazim disingkat dengan Pilkada baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, merupakan perwujudan pengembalian hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan pilkada langsung tersebut, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom, sebagaimana rakyat memilih presiden dan wakil presiden (eksekutif), dan DPD, DPR, dan DPRD (legislatif). Pilkada langsung merupakan instrumen politik yang sangat strategis untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan kepala daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan, Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hlm.191



Pemilihan kepala daerah adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengthening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Urgensi diterapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung dan serentak juga terkait erat dengan upaya mewujudkan tujuan penting kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemilihan kepala daerah langsung dan serentak merupakan salah satu terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistim pemerintahan, serta terwujudnya stabilitas politik dan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung UUD 1945. Tahun 2015 adalah tahun bersejarah untuk bangsa ini dimana pada tahun tersebut pilkada (pemilihan kepala daerah) langsung pertama kalinya di gelar serentak pertama pada desember 2015.<sup>6</sup>

Otonomi daerah merupakan wadah pendidikan politik yang tercermin dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Hal ini sangat bermanfaat untuk kelanjutan karir politik di tingkat nasional. Selain itu, pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang di dukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.<sup>7</sup> Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan

---

<sup>6</sup>M. Iwan Satriawan, *Metamorfosis Kaum Sarungan*, (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2017), hlm. 110

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 194

pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

Alasan penting mengapa pilkada serentak harus dilaksanakan yakni, untuk memperkuat efektifitas sistem pemerintahan presidensial (*efektive goverment*), efisiensi pembiayaan penyelenggaraan pilkada (*efisien goverment*), dan penataan siklus penyelenggaraan pemilu secara Nasional (*election cycle management*).<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, Pemilihan Kepala Daerah tidak diatur secara khusus, dikarenakan kepala daerah dimasa klasik tidak di pilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh *khalifah*. Namun demikian, Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Allah SWT berfirman.<sup>9</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>10</sup> (Q.S. an-Nisaâ' :4 :59)

Dalam ayat diatas, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasulnya dan *Ulil amri*. Dalam Tafsir Jalalain diterangkan

<sup>8</sup><http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/08/2018, jam 19:00>

<sup>9</sup>Wery gusmansyah, *Pemilihan, kepala, Daerah, (pilkada), Dalam Perspektif Siyasa*, (IAIN Bengkulu Press: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 70

<sup>10</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2004), QS. An Nisa : (59), h.87

bahwa *Ulil Amri* dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun gubernur. Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya mengutip suatu hadits dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: “Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada amirku (yang muslim) maka ia taat kepadaku dan barangsiapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku”. (HR. Bukhari & Muslim)<sup>11</sup>

Hadits tersebut menerangkan bahwa urusan ketaatan kepada penguasa dalam perspektif Islam tersambung dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul Nya. Artinya, politik pemerintahan dunia tidak terpisah dengan ajaran Islam yang berdimensi dunia akhirat. Siapapun muslim, baik sebagai rakyat maupun penguasa tidak boleh memisahkan urusan politik dengan urusan Agama Islam.<sup>12</sup>

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian

<sup>11</sup>Ibid, Wery Gusman, h. 57.

<sup>12</sup>[http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/08/2018,jam 19:30](http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/08/2018,jam%2019:30)

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya, (Q.S Al-Imran :3 :159).<sup>13</sup>

Mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Dalam hal ini faktanya banyak sekali perdebatan penafsiran antara para pihak atau ketidak jelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota, bahkan pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan yang berbeda, penghindaran dari pihak lain baik perbedaan penafsiran maupun penolakan.

Ada banyak masalah yang bisa diidentifikasi selama proses pemilihan kepala daerah. Ia tidak hanya berlangsung pada tahap persiapan, namun terjadi pula pada tahap pelaksanaan pilkada, yang meliputi: pertama, tidak akuratnya penetapan data pemilih. Masalah data pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pilkada mengalami ketidak akuratan data pemilih dan pada sebagian daerah menimbulkan gelombang protes dan demonstrasi dari masyarakat banyak.<sup>14</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung secara esensial bertujuan untuk lebih menguatkan legitimasi politik ‘penguasa’ di daerah.

<sup>13</sup>*Ibid.* QS. Al-Imran : (159), h. 71

<sup>14</sup>Leo Agustino, *Pilkada, dan Dinamika, Politik, Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009) hlm. 121-122



Namun, dalam konteks lain terjadi kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, karena pilkada langsung diindikasikan kuat akan makin menyuburkan ‘budaya’ *money politik*. Praktik politik uang tersebut bisa terjadi pada saat pengusulan calon yang dilakukan partai dan saat pencarian dukungan langsung dari rakyat.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan pasal 73 undang-undang nomor 10 tahun 2016 pada ayat (1) calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau memilih. Namun faktanya yang terjadi di lapangan antara teori dan praktik tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh tim pemenang untuk menguntungkan salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah waktu lalu. Contoh yang paling menonjol menurut ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten tanggamus adalah pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu *money politik* dan atau menjanjikan materi lainnya dan pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan penempatannya. Padahal itu tidak dibenarkan dan menyalahi peraturan yang berlaku dalam pemilihan kepala daerah.

Jenis-jenis pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah menurut undang-undang secara garis besar dapat digolongkan 3 jenis perbuatan berikut : Pelanggaran Tindak pidana, Pelanggaran kode etik dan, Pelanggaran administrasi.

---

<sup>15</sup>*Ibid. hlm.126*

Jenis-jenis pelanggaran pemilihan kepala daerah di atas, itulah yang akan dikaji tentang pelanggaran tindak pidana pemilu, di kabupaten tanggamus. Dalam penelitian ini dengan mengambil objek di dalam wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Tanggamus.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian mengenai hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Perspektif *Siyâsah Dustûriyyâh* (Studi di Bawaslu Kabupaten Tanggamus).

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah memfokuskan pada upaya Bawaslu Kabupaten Tanggamus dalam menangani kasus-kasus baik laporan, maupun temuan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 14 Tahun 2017, tentang penanganan Laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Tanggamus ?

2. Bagaimana tinjauan *Siyâsah Dustûriyyâh* terhadap Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Nomor 14 tahun 2017 ?

#### **F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :
  - a. Mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang menjadi temuan oleh badan pengawas pemilu pada pemilihan kepala daerah dan bagaimana prosedur penyelesaiannya yang ditempuh.
  - b. Mengetahui bagaimana pandangan *Siyâsah Dustûriyyâh* dan undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan penanganan pelanggaran pilkada.
2. Kegunaan dari Penelitian Skripsi ini adalah:
  - a. Kegunaan Secara Teoritis
    - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal bagi para pihak yang berminat untuk mengkaji masalah ini sekaligus untuk memahami hazanah pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.
    - 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pelanggaran pemilihan kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran pemilihan kepala daerah menurut *Siyâsah Dustûriyyâh* di lingkungan akademisi perguruan tinggi.

#### b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Untuk dijadikan sebagai peneliti berikutnya khususnya bagi penelitian penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah tentang pemilihan kepala daerah.

### G. Signifikasi Penelitian

Pentingnya dalam melakukan penelitian ini adalah agar masyarakat Tanggamus dan khususnya para kontestan, partai politik dan simpatisan calon, agar tidak melakukan praktik-praktik kotor seperti politik uang, kampanye hitam, perusakan alat peraga kampanye dan lain sebagainya, untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Karena pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembangunan di daerah, hal tersebut telah tertuang di dalam UUD 1945. Dan pemilihan kepala daerah telah di atur dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

### H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:



## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian *Field Research* yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya<sup>16</sup>. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanggamus.
- b. Sifat Penelitian ini bersifat Penelitian Inferensial yaitu “pada jenis penelitian ini penulis tidak hanya melukiskan suatu peristiwa saja, akan tetapi mengambil kesimpulan umum dari masalah yang tengah di bahas.”<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian tepatnya di Bawaslu Kabupaten Tanggamus. Data ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan wawancara, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah disiapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara.<sup>18</sup> Pihak-pihak yang di wawancarai khususnya ketua dan anggota kemudian bagian hukum dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>16</sup>Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pusat penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h.10

<sup>17</sup>Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), h.70

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.50

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada diluar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang.<sup>19</sup> Data sekunder ini diperoleh dari studi perpustakaan, bahan-bahan hukum primer seperti Undang-undang pemilihan kepala daerah, tindak pidana khusus, sistem politik di Indonesia dan bahan-bahan buku sekunder seperti Al-Qur'an dan Hadits atau kamus bahasa Indonesia, kamus hukum serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam data sekunder digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda dan lain sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian serta dengan melihat keterangan tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah di Bawaslu Kabupaten Tanggamus Lampung.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik

---

<sup>19</sup>*Ibid. hlm. 51*

kesimpulannya.<sup>20</sup> Menurut winarno surahmat dalam “dasar dan teknik *research* pengantar metodologi ilmiah”, memberikan pedoman sebagai berikut: “Apabila populasi cukup homogen (serba sama), terhadap populasi dibawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50%, diatas 1.000 sebesar 15%.<sup>21</sup>

## **b. Sampel**

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Dalam menentukan sampel menggunakan teknik *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.<sup>22</sup>

Populasi yang berada di lembaga Bawaslu Kabupaten Tanggamus berjumlah 19 orang terdiri dari 3 komisioner Bawaslu 1 ketua merangkap anggota dan 2 anggota, Kemudian ditambah anggota beberapa divisi.

---

<sup>20</sup>Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), h. 80

<sup>21</sup>*Ibid.* Susiadi, hlm. 95

<sup>22</sup> *Ibid.* Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. hlm. 81

Yang pertama. Divisi Hukum dan Gakkumdu 5 orang, kedua. Divisi Penindakan, divisi penanganan hasil laporan (PHL), serta penyelesaian sengketa pemilu (PSU) 6 orang, dan ketiga. Divisi sumberdaya manusia dan sosialisai (SDMO) 5 orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah “pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.”<sup>23</sup> Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi, yaitu proses mengirimkan atau meneruskan dan menerima isyarat-isyarat atau pesan-pesan tertentu. Adapun teknik yang penulis pergunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut.

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah : sesuatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan di arahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam hal ini dilakukan dengan wawancara dengan orang-orang yang di anggap dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi,

---

<sup>23</sup>*Ibid.* h. 98-104.



laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumentasi lainnya.

## 5. Metode Pengolaan Data

Metode pengolaan data penulis menggunakan pengolahan data *Kualifikasi Geografis* yaitu “pengolaan materi berdasarkan kesatuan-kesatuan daerah *geografis*, misalnya menurut negaranya, wilayah/kawasan, kota, desa, kampung dan seterusnya.”<sup>24</sup> Data-data yang telah terkumpul kemudian di olah, pengadaaan data umumnya dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan itu tidak logis kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*Coding*) adalah mengklarifikasi jawaban-jawaban daripada responden kedalam kategori-kategori. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan kode/tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

## 6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 115.

berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>25</sup>

Analisa deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.<sup>26</sup> Metode ini dilaksanakan dengan cara mengalisa data-data yang adadari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi (benar terjadi).



---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 122

<sup>26</sup>*Ibid. h. 68*

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyâsah Dustûriyyâh*

##### 1. Pengertian *Siyâsah Dustûriyyâh*

Dalam konteks ke Indonesiaan, urusan bernegara tidak bisa dilepaskan dari urusan beragama. Dengan latar sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kajian fikih menjadi suatu keniscayaan sebagai kajian memperoleh nilai-nilai normatif untuk segala kegiatan, termasuk masalah pemilihan pemimpin.<sup>27</sup> Oleh karena itu, kajian ini mengomparasikan Pilkada langsung dan tidak langsung secara normatif dari sudut pandang *siyâsah* antara kedua sistem Pilkada yang dianut oleh Negara Indonesia.

*Siyâsah Dustûriyyâh* yaitu bagian dari *fiqh siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan atau peraturan negara. Dalam bagaian ini di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan negara), lembaga demokrasi dan *syûrâ'* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>28</sup> *Siyâsah Dustûriyyâh* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Siyâsah Dustûriyyâh* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil

---

<sup>27</sup>Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi palsu*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015), h. 161

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2016), hlm. 177

*kulli*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *muqhâsid syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.<sup>29</sup>

Selanjutnya kedua adalah hasil Ijtihat para ulama, di dalam masalah *fiqih Dustûriyâh*, hasil ijtiat para ulama ini sangat membantu kita dalam memahami semangat *Siyâsah Dustûriyyâh* dan prinsip-prinsip nya. Dalam mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

Kemudian sumber ketiga mempunyai enam prinsip yaitu tujuan hukum islam, prinsip *Taûhid*, prinsip *amar ma'ruf nahi mûnkar*, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip saling tolong menolong, dan prinsip toleransi. Sedangkan Sumber terakhir *Siyâsah Dustûriyyâh* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadist.<sup>30</sup>

*Siyâsah Dustûriyyâh* dapat terbagi kepada 4 (empat) bagian:

- a. Bidang *siyâsah syar'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahl al-hall Wa al-'qd*, atau majelis *syûrâ*' (legislatif). Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan pelaksanaan, peraturan daerah.<sup>31</sup>
- b. Bidang *siyâsah tanfidziyyah*, (eksekutif), yang bertugas menjalankan pemerintahan.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 180

<sup>30</sup> <http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/01/2019,jam:08.30>

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 187



- c. Bidang *siyâsah qadhâ'iyyah*, (yudikatif), dalam hal ini menjalankan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan masyarakat, mengawasi pelaksanaan pemerintahan dll.
- d. Bidang *siyâsah idâriyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.<sup>32</sup>

Dalam hal ini Pemilihan kepala daerah adalah sarana dan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>33</sup>

Menurut Sukron Kamil bahwa dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan Agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Agama membutuhkan negara begitu juga sebaliknya.

Kemudian Imam Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan negara, untuk mengelola kebutuhan masyarakat. Para teoritis politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 187

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 98

itu negara sebagai bentuk kerjasama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agamanya sebagai pedoman dan rujukan.<sup>34</sup>

Dalam *Siyâsah Dustûriyyâh*, Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri.<sup>35</sup> Manusia diciptakan sebagai pemimpin atau *khâlifah* di muka bumi, hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنٌ نُّسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S. Al-Baqarah: 2: 30).<sup>36</sup>

Dalam hukum Islam kita kenal Dengan *Fiqh siyâsah*, kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. *Fiqh* adalah semua kumpulan *ijtihad* para ulama tentang hukum *syara'*. Secara bahasa *fiqh* adalah “paham yang mendalam”, Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin menyebutkan *fiqh* adalah tentang sesuatu, berarti mengetahui tentang batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” di ungkapkan dalam

<sup>34</sup> Sukron Kamil, *Pemikiran Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 34.

<sup>35</sup>A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group, 2012), hlm. 192

<sup>36</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2004), QS. Al-Baqarah : (30), hlm. 6

Al-Qur'an sebanyak 20 (duapuluh) kali, 19 (sembilan belas) kali, yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.

Secara terminologis Al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqih* menjelaskan mengenai hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqih* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut “*faqih*” karena baginya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.<sup>37</sup>

Kedudukan dan fungsi Kepala Daerah dalam pandangan Islam adalah sangat penting. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah disurat *An-Nisâ* yang berbunyi sebagai berikut. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S an-Nisâ':4:59).<sup>38</sup>

Ayat di atas, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-nya dan *Ulil Amri*. Dalam *Tafsir jalalain* dijelaskan bahwa *Ulil Amri* dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam walikota maupun gubernur.

<sup>37</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta : Amzah, 2005), h. 28

<sup>38</sup>*Ibid.* (Q.S. An-Nisa' : 59), hlm. 87

Dua Ayat Al-Qur'an di atas, menggambarkan dan memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan musyawarah yang diadakan di kalangan rakyat dalam menentukan seorang pemimpin. Urusan-urusan umat yang diperintah oleh Allah lewat ayat di atas untuk di musyawarahkan.<sup>39</sup>

Hadits nabi yang di riwayatkan oleh Auf bin Malik yang berbunyi :

خَيْرُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرَّارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. (رواه مسلم)

Artinya : “pemimpin terbaik di antara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, mereka mendo'akan kalian dan kalianpun mendo'akan mereka. Dan pemimpin terburuk diantara kalian ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan merekapun melaknat kalian”. (H.R. Muslim; No hadist: 3447).<sup>40</sup>

Di dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh *Khalifah* meskipun Islam tidak menulis aturan khusus tentang pemilihan kepala daerah namun Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.<sup>41</sup>

Menurut sejarah Islam ada beberapa metode untuk memilih pemimpin, di antaranya adalah pada saat pemilihan *khâlifah* sepeninggalan Nabi Muhammad, pertama proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sepeninggalan Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok *Muhajirin* dan kelompok *Anshâr*.

<sup>39</sup> *Ibid*, Farid Abdul Faqih, h. 51.

<sup>40</sup> *Ibid*, Wery Gusmansyah, h. 110

<sup>41</sup> *Ibid*, Sukron Kamil, h. 90

Akan tetapi hasil musyawarah bersama menyepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi pemimpin umat Islam pada zaman tersebut. Kemudian terpilihnya Umar Ibn Khathab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat yang di berikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khathab. Sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khathab melalui musyawarah *ahl al-hall Wa al-'qd* (dewan pemilih) yang ditunjuk oleh umar. Sementara Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyah. Adapun kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan. Kemudian ketika Muawiyah akan turun tahta, ia mengumumkan penggantinya kepada putranya (Yazid).<sup>42</sup> Sejak itu pula sistem pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun temurun (memberikan mandat kepada putra mahkota).<sup>43</sup>

Imam Al-Mawardi dan beberapa ulama lainnya menyebutnya *ahl al-ikhtiyâr* (orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk memilihnya). Merekalah yang disertai tanggung jawab tersebut. Mereka bertindak sebagai wakil umat secara keseluruhan dalam menggunakan apa yang menjadi hak murni bagi umat. Mereka adalah kuasa usaha umat atau wakil umat. Kemudian sebagian besar *fuqaha* membicarakan *Ahl al-hall Wa al-'qd* sebagai sebuah institusi yang belum berbentuk secara jelas. Hanya saja

---

<sup>42</sup>Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara", (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 15.

<sup>43</sup>Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 70



dapat dipahami dari frekuensi pengulangan Al-Mawardi dan yang lainnya mengenai ungkapan *ahl al-ikhtiyâr* bahwa institusi ini mesti terbentuk sebagai sebuah lembaga.<sup>44</sup>

Imam Al Mawardi dalam tafsirnya mengutip suatu hadits dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: “Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada amirku (yang muslim) maka ia taat kepadaku dan barangsiapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku”. (HR. Bukhari & Muslim).<sup>45</sup>

Hadits tersebut menerangkan bahwa urusan ketaatan kepada penguasa dalam perspektif Islam tersambung dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul Nya. Artinya, politik pemerintahan dunia tidak terpisah dengan ajaran Islam yang berdimensi dunia akhirat. Siapapun muslim, baik sebagai rakyat maupun penguasa tidak boleh memisahkan urusan politik dengan urusan agama Islam.<sup>46</sup>

## 2. Pelaksanaan Peraturan Bawaslu Menurut *Siyâsah Dustûriyyâh*

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.

<sup>44</sup> Imam al-Mawardi, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, Kamalludin Nurdin, (Jakarta : Ed,Cet.II, Sinar Grafika, 2008), h. 85.

<sup>45</sup> *Ibid*, Wery Gusman, h. 57.

<sup>46</sup> <http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/05/2019, jam 19:30>

Sedangkan dalam konsep *fiqh siyâsah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut *Siyâsah Qadhâ'iyah*.<sup>47</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan. mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikan kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.<sup>48</sup>

Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakkannya. Karena tanpa lembaga '*al-Qadhâ'*' tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadhâ'*) terbagi ke dalam tiga *wilâyah*, yaitu *wilâyah qadâ*, *wilâyah mazhâlim*, dan *wilâyah hisbah*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Siyâsah tasyrî'iyah* (kekuasaan legislatif), *Siyâsah tanfîdziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Siyâsah Qadhâ'iyah* (kekuasaan yudikatif).<sup>49</sup>

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*)

---

<sup>47</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 98

<sup>48</sup> *Ibid*, Imam al-Mawardi, hlm. 17

<sup>49</sup> *Ibid. hlm. 17*

atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan al-Qur'an dan al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, sedangkan eksistensi Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.<sup>50</sup>

Adapun tugas *Sultah al-Qadhâ'iyyah*, adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilâyah hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilâyah qadhâ* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilâyah mazhâlim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).<sup>51</sup>

Dalam *Siyâsah Qadhâ'iyya*, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai panitia pengawas pemilu. Hal ini dikenal dengan *wilâyah hisbah*, yakni berasal dari kata *al-wilâ'iyah* yang berarti kekuasaan atau

---

<sup>50</sup> *Ibid. hlm. 98*

<sup>51</sup> Abdul Mu'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.150

kewenangan. Dan *hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.<sup>52</sup>

*Al-hisbah* adalah suatu tugas keagamaan dengan misi untuk melakukan *amar ma'rûf nahi munkar*, menyuruh orang melakukan kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Secara garis besar tugas dari lembaga *hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *hisbah*. Sedangkan tugas dari *Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.<sup>53</sup>

*Wilâyah hisbah* adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Disamping *wilâyah hisbah* bertugas mengawasi, menyandarkan, dan membina. *wilâyah hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at, tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim diluar bentuk hukuman yang ditetapkan *syara'*. Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlah oleh *syara'*. Tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 180

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 17

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm.20

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyîr bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.<sup>55</sup>

Seorang *Muhtasib* tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan, akan tetapi *muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan. Oleh sebab itu, para *muhtasib* bebas memilih hukum bagi pelanggar *hisbah*, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat, misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Menurut ulama *fiqh*, *muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>56</sup>

Penegakkan hukum jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang telah diturunkan Allah SWT, namun bukan satu-satunya. Karena yang dimaksudkan dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah SWT adalah mengatur seluruh

---

<sup>55</sup> *Ibid. hlm.20*

<sup>56</sup> *Ibid. hlm.20*



persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum syariat yang jelas dalam ayat Al-Qur'an atau yang disimpulkan dari ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan kaidah ijtihad yang tepat.<sup>57</sup>

mengatur persoalan dunia dan agama, dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Penegakkan hukum jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukuman yang telah diturunkan Allah SWT, namun bukan satu-satunya. Karena yang dimaksudkan dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah SWT adalah mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum syariat yang jelas dalam ayat Al-Qur'an atau yang disimpulkan dari ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan kaidah ijtihad yang tepat.<sup>58</sup>

Diantara sejumlah prinsip utama dalam masalah Pemilihan pemimpin adalah masalah keadilan. Berkaitan dengan penegakkan hukum, didapati dalam Al-Qur'an menetapkan kewajiban berlaku adil terhadap manusia sekalipun dengan menggunakan kekuatan. Allah SWT berfirman.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ  
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi

<sup>57</sup> Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah, (Pilkada), Dalam Perspektif Siyasa*, (IAIN Bengkulu Press: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 120

<sup>58</sup> *Ibid. hlm.120*

manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al Hadîd :57:25).<sup>59</sup>

Pernyataan diatas menunjukan bahwa menegakkan keadilan adalah merupakan hal yang sangat penting baik dikaitkan dengan pemilihan pemimpin maupun dalam proses menyelesaikan perkara hukum. Dikarenakan keadilan merupakan sistem segala sesuatu yang ada di dunia ini.<sup>60</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Hasyr : 59:18).<sup>61</sup>

Fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga Bawaslu sama juga dengan lembaga *hisbah*. *Amar ma'ruf nahi munkar* dalam sistem tata negara Islam, akan tetapi Bawaslu hanya menegakkan hukum dalam pemilu artinya *wilâyah* kewenangan yang ada pada Bawaslu hanya sebatas menjalankan peraturan atau undang-undang pada persoalan pengawasan dalam pemilihan kepala pemerintahan di daerah.

<sup>59</sup> Ibid. (Q.S. Al Hadid : 25), hlm. 541

<sup>60</sup> Ibid. hlm. 20

<sup>61</sup> Ibid. (Q.S. Al-Hasyr :59:18), hlm. 545

## B. Pemilihan Kepala Daerah dan Urgensinya

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraanya di Indonesia merupakan sebuah polemik di masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi.<sup>62</sup>

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana dan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah secara demokrasi.<sup>63</sup>

Pemilihan kepala daerah langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-

---

<sup>62</sup>Hendra Budiman, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-I (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 19.

<sup>63</sup>*Ibid*, A. Ubaedillah, hlm.203

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan atau Walikota menjadi Undang-undang.<sup>64</sup>

Pilkada langsung merupakan instrumen politik yang sangat strategis untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan kepala daerah. Legitimasi adalah komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral, dan sosial. Seorang kepala daerah yang memiliki legitimasi adalah kepala daerah yang terpilih melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemilihan yang demokratis, dan didukung oleh suara terbanyak.<sup>65</sup>

Berbicara mengenai demokrasi kita mengenal ada dua model yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan) tergantung bagaimana pelaksanaannya saja. Jika mengacu pada Amerika maka menggunakan senat sebagai wakil rakyat, namun jika mengacu pada Swiss maka memakai sistem kolektif kolegal.

Pelaksanaan demokrasi langsung pada awalnya diberlakukan pada model negara-negara polis sebagaimana halnya yang diberlakukan di Yunani pada zaman Aristoteles. Namun seiring dengan berjalannya waktu maka pelaksanaan demokrasi secara langsung mulai dirasakan menemui kesulitan disebabkan semakin luasnya wilayah suatu negara. Maka untuk mensiasati kesulitan tersebut dirubahlah demokrasi langsung menjadi demokrasi perwakilan.

---

<sup>64</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan atau Walikota

<sup>65</sup> Kancil, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 3

Fenomena yang terjadi di Indonesia berbeda dengan semangat demokrasi perwakilan. Munculnya pemilihan kepala daerah secara langsung pada awal tahun 2004 adalah sebagai salah satu cara untuk meminimalisir adanya politik uang di gedung dewan pada saat pemilihan kepala daerah. Apalagi dengan keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun yang sama semakin membulatkan tekad pemerintah pusat untuk menggulirkan pelaksanaan pilkada langsung.<sup>66</sup> Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah harus memenuhi beberapa kriteria:

1. Langsung: Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Umum: Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas: Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia: Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak diketahui pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan

---

<sup>66</sup> M. Iwan satriawan, *metamorfosis kaum sarungan* (Bandar Lampung : Pusaka media, 2017), hlm. 98-99



suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih semua serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil: Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, setiap pemilih dan calon/peserta pemilihan kepala daerah mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>67</sup>

Pemilihan kepala daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung.<sup>68</sup>

Menurut Djohermansyah, pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi segera mungkin kelemahan dalam pemilihan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 191-192

<sup>68</sup> Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Diindonesia* (Jakarta: Putra Kemang, 2006), hlm. 98

kepala daerah masa lalu. Pemilihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintah (*governance*) maupun lingkungan masyarakat. Ada lima alasan atau manfaat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah :

1. Pemilihan kepala daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan kepala daerah akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat pemerintah, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.
2. Pemilihan kepala daerah membuat akuntabilitas publik kepada daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.
3. Pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel dimasyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
4. Pemilihan kepala daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah digoyang oleh politisi lokal, pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.
5. Pemilihan kepala daerah mengurangi politik uang pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, antara lain saat menyampaikan laporan

pertanggung jawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikkan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif.<sup>69</sup>

Pemilukada selain menjadi pintu terbukanya proses demokratisasi, juga tidak menegasikan pada saat yang bersamaan, Pemilukada juga dapat menjadi bumerang bagi demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya persoalan yang muncul, baik sebelum, saat sedang, maupun pasca Pemilukada berlangsung. Tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian aktivis dan politisi bahwa demokrasi akan tumbuh subur dan cepat di Indonesia jika ditanam di atas kuburan rezim Orde Baru. Demokrasi yang diharapkan segera hadir dengan sosoknya yang utuh dan sejati, ternyata tidak segera muncul. Bahkan demokrasi pasca Orde Baru mengundang pertanyaan serius terhadap masa depannya.

Pelaksanaan Pemilukada pertama terjadi pada 2005, merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, dengan dilaksanakannya Pemilukada yang didasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam perjalanannya, Pemilukada telah mengalami pasang-surut perkembangan. Dari pengalaman secara nasional, pelaksanaan Pemilukada

---

<sup>69</sup> Suharizal, *pemilukada : regulasi, dinamika, dan konsep mendatang*, ( jakarta : rajawali pers, 2012). hlm. 40-41

banyak menuai polemik dan konflik. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilukada mengalami gejala konflik politik yang cukup serius dan cenderung destruktif sampai kepada kerusuhan, baik antar massa pendukung kandidat, maupun dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Munculnya masalah ini mengakibatkan demokrasi yang terbangun, bukannya proses demokrasi sejatinya, tetapi anarki atau apa yang disebut oleh sejumlah pengamat dengan "democrazy", yakni suatu proses demokrasi yang berorientasi kepada kepentingan kekuasaan pribadi, kelompok dan golongan yang cenderung menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan. Kasus Pemilukada dalam berbagai wacana demokrasi lokal yang terjadi seperti ini, telah mereduksi makna dari demokrasi, dan disaat yang bersamaan, memproklamirkan bahwa demokrasi prosedural merupakan satu-satunya jalan dalam membangun sebuah negara.<sup>70</sup>

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari kekuatan, intimidasi, kekerasan, penyuapan,

---

<sup>70</sup> Hamzah, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Perspektif Hukum Islam*", (Disertasi Program Doktor Syari'ah/Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2013), h. 40.

penipuan, merusak alat peraga kampanye dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu.<sup>71</sup>

Proses penegakkan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakkan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>72</sup>

Sementara itu menurut Sajipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakkan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, dibedakan dalam tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakkan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang, lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakkan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009). h. 20

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta 1983). hlm. 15

<sup>73</sup> Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru 1983). h. 23-24.



### C. Tinjauan Pustaka

Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak merupakan salah satu terwujudnya Kedaulatan Rakyat dalam sistim pemerintahan, serta terwujudnya stabilitas politik dan tujuan pembangunan nasional diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung UUD 1945. Tahun 2015 adalah tahun bersejarah karena sejak tahun tersebut pemilihan kepala daerah (PILKADA) langsung dan serentak pertama pada Desember 2015.<sup>74</sup>

Secara umum dikatakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung itu demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemilihan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Gagasan pemilihan umum kepala daerah secara langsung lahir dari keinginan agar kepala daerah terpilih benar-benar representative, artinya seorang Bupati misalnya, terpilih atau dipilih bukan hasil rekayasa politik anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang pada akhirnya kepala daerah bukanlah hasil keinginan rakyat yang sebenarnya.

---

<sup>74</sup> Beriyanasyah, *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung). (Skripsi S1 Program Jinayah Siyasah Institut Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 17.

Badan Pembina Hukum Nasional yang meneliti mengenai pemilihan kepala daerah mengemukakan, bahwa dari berbagai pandangan dapat ditarik hipotesis bahwa pemilihan kepala daerah langsung mempunyai sisi positif. Sisi positif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melalui Pemilukada langsung diharapkan masyarakat, pemilih dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya masing-masing, tanpa ikut campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui pilkada langsung diharapkan bisa memotong kecenderungan oligarki partai politik tertentu dalam menentukan kepala daerah.
2. Melalui pemilukada langsung diharapkan mengurai fenomena politik uang (*money politic*) yang begitu masif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh wakil rakyat di parlemen.
3. Melalui pemilukada langsung, diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik lokal hingga nasional dan efektivitas pemerintahan daerah dan pusat.<sup>75</sup>

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan sebagaimana pasal 135 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang no 8 Tahun 2015 jo. Undang-undang no 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan,

---

<sup>75</sup> Mat Khoiruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015*. (Skripsi S1 Program Hukum Tata Negara (siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 41-43.

pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tidak pidana pemilihan.<sup>76</sup>

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.<sup>77</sup> Subyek pelanggarannya meliputi para penyelenggara dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara (TPS). Bentuk pelanggarannya bermacam-macam; contoh menerima gratifikasi dari paslon, penyelenggara pemilu menjadi timsukses paslon, meniadakan penyelenggara pemilihan di tingkat bawahnya, tidak menyediakan logistik atau fasilitas sarana pemilihan. Dalam penanganannya panwas mendapat laporan dari masyarakat kemudian meneruskannya kepada Bawaslu dan akan di teruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk di selesaikan.

2. Pelanggaran Administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Contohnya, tidak menyebarkan C6 (surat pemberitahuan Pemilih), data pemilih ganda, ketidak sesuaian jumlah (DPT) antara rekap kecamatan dan kabupaten yang menyebabkan sebagian warga negara kehilangan hak pilihnya, pelanggaran semacam ini seolah-olah hanya merupakan persoalan

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

<sup>77</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

dan pelanggaran administrasi. hal ini bisa saja merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, apabila ada unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pemidanaan dalam undang-undang daerah.<sup>78</sup> Dalam penanganannya panwas mendapatkan laporan dari masyarakat atau menjadi temuan panwas, yang kemudian di teruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk di selesaikan.

3. Sengketa Pemilihan yaitu sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam penanganannya Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
4. Tindak Pidana Pemilihan, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye di luar jadwal yang telah di tetapkan, melakukan intimidasi atau kekerasan terhadap pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, merusak alat peraga kampanye (APK) paslon. Dalam Undang-undang pilkada tindakan tersebut sudah

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 98

menyalahi aturan yang berlaku dan dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Hukum di satu sisi bersifat praktis dan di sisi lain bersifat teoritis. Pemahaman mengenai hukum sampai saat ini sangat sulit didapati. Tetapi secara sederhana hukum adalah seperangkat kaidah yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan manusia. Hukum yang merupakan seperangkat kaidah dinormatiskan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan ini harus ditegakkan dalam arti diimplementasikan agar dapat berlaku secara efektif.

Salah satu ranah hukum yang ada di Indonesia adalah hukum kepegawaian yang mengatur mengenai pegawai negeri itu sendiri, termasuk di dalamnya terkait dengan netralitas. Pelaksanaan netralitas pegawai negeri sendiri sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan hangat, oleh sebab itulah perlu dikaji lebih mendalam mengenai netralitas dan penegakkan hukumnya.

Makna netralitas tersebut di atas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik karena dikhawatirkan pegawai tersebut menyalahgunakan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai seperti yang telah terjadi pada masa Orde Baru.

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kebijakan politik yang melarang PNS untuk terlibat politik praktis atau harus netral dalam politik

karena keberadaannya sebagai pelayan masyarakat. Makna dari netralitas ini menurut Marbun yaitu agar bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik atau tidak berperan dalam proses politik, namun masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih, dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Maksud netralitas yang lain adalah jika seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.<sup>79</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perbuhan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Dijelaskan pada pasal 70 ayat 1 huruf b, dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan; aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.<sup>80</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bahwa PNS dilarang.

1. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda

---

<sup>79</sup> Abdillah Afandi, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung (Studi di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan”*, Bandar Lampung). (Skripsi S1 Siyasah Syar’iyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 45

<sup>80</sup> *Ibid*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.



Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan.

2. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.<sup>81</sup>

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benarbenar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Abdillah Afandi, h. 45.

Panwas Pilkada sangat berperan penting mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan juga mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Pemasangan APK merupakan salah satu metode kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada. Secara teknis dan detil pengaturan pemasangan APK tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan kepala daerah. APK ialah alat peraga yang berbentuk spanduk, baliho, dan umbul-umbul, selain itu disebut dengan bahan kampanye. APK didesain oleh peserta Pilkada yang kemudian diserahkan kepada KPU untuk

dicetak dan diproduksi oleh rekanan yang ditunjuk oleh KPU. Pemasangan APK pun akan dilakukan oleh KPU di lokasi yang telah disepakati bersama dengan Pemda. Paslon juga dapat memproduksi sendiri APK sebanyak 150% dari yang ditetapkan KPU sepanjang ukuran APK tersebut sesuai dengan yang diproduksi oleh KPU.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Fajar Ryan Akbar AM, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus*, ( Skripsi S1 Program Hukum Pidana Univesitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 24.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan, Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012).
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Ayi sofyan, *Etika, Politik, Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012).
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Grafindo Persada, 2005).
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2004).
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2004).
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*. 2007
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta : Amzah, 2005).
- Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi palsu*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015).
- Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi* ( Jakarta : MK, 2013 ).
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Penerjemah Fadli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2017).
- Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani dan Kamalludin Nurdin, (Jakarta : Ed,Cet.II, Sinar Grafika, 2008).

Kancil, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005).

Leo Agustino, *Pilkada, dan Dinamika, Politik, Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009).

M. Iwan Satriawan, *Metamorfosis Kaum Sarungan*, (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2017).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2016).

Peraturan Bawaslu RI, Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Proses Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara", (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000)

Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pusat penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sukron Kamil, *Pemikiran Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta 1983).

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru 1983).

Suharizal, *Pemilukada, regulasi, dinamika, dan konsep mendatang*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada serentak* ( Bandung : expose, 2017 ).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan atau Walikota

Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dalam Perspetif Siyasah*, (Bengkulu : Pustaka Pelajar : 2017).

Wahbah-Al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus : Darul Fikr, 2001).

Wery gusmansyah, *Pemilihan, kepala, Daerah, (pilkada), Dalam Perspektif Siyasah*, (IAIN Bengkulu Press: Pustaka Pelajar, 2017).

Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Diindonesia* (Jakarta: Putra Kemang, 2006).

<http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/08/2018>, jam 19:30

<http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/08/2018>, jam 19:00

<http://kbbi.web.id/peraturan.html> (tanggal 10 oktober 2018) 09:45

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_umum](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_umum) (tanggal 10 Oktober 2018).

<http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/01/2019>, jam: 08.30

<http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/08/2018>, jam 19:30



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan, Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012).
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Ayi sofyan, *Etika, Politik, Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012).
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Grafindo Persada, 2005).
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2004).
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2004).
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*. 2007
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta : Amzah, 2005).
- Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi palsu*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015).
- Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi* ( Jakarta : MK, 2013 ).
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Penerjemah Fadli Bahri (Jakarta : Darul Falah, 2017).
- Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani dan Kamalludin Nurdin, (Jakarta : Ed,Cet.II, Sinar Grafika, 2008).

Kancil, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005).

Leo Agustino, *Pilkada, dan Dinamika, Politik, Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009).

M. Iwan Satriawan, *Metamorfosis Kaum Sarungan*, (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2017).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2016).

Peraturan Bawaslu RI, Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Proses Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara", (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000)

Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pusat penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sukron Kamil, *Pemikiran Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta 1983).

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru 1983).

Suharizal, *Pemilukada, regulasi, dinamika, dan konsep mendatang*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada serentak* ( Bandung : expose, 2017 ).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan atau Walikota

Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dalam Perspetif Siyasah*, (Bengkulu : Pustaka Pelajar : 2017).

Wahbah-Al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus : Darul Fikr, 2001).

Wery gusmansyah, *Pemilihan, kepala, Daerah, (pilkada), Dalam Perspektif Siyasah*, (IAIN Bengkulu Press: Pustaka Pelajar, 2017).

Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Diindonesia* (Jakarta: Putra Kemang, 2006).

<http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/08/2018>, jam 19:30

<http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/08/2018>, jam 19:00

<http://kbbi.web.id/peraturan.html> (tanggal 10 oktober 2018) 09:45

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_umum](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_umum) (tanggal 10 Oktober 2018).

<http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/01/2019>, jam: 08.30

<http://www.suara-islam.com/read/index/1960/-hakikat-pilkada-dalam-perspektif-islam.09/08/2018>, jam 19:30